

# Perspektif Guru dan Siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun entrepreneurship Alumni

Yanuar Rafindo<sup>a,1</sup>, M Salam<sup>b,2</sup>, Nurmalia Dewi<sup>c,3</sup>, Yetniwati<sup>d,4</sup>

<sup>a, b, c, d</sup> Universitas Jambi, Jl. Jambi, Muara Bulian No. Km. 15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

<sup>1</sup> [yanuarrafindo@gmail.com](mailto:yanuarrafindo@gmail.com); <sup>2</sup> [salam.fkip@unja.ac.id](mailto:salam.fkip@unja.ac.id); <sup>3</sup> [nurmalia.dewi@unja.ac.id](mailto:nurmalia.dewi@unja.ac.id); <sup>4</sup> [yetniwati@unja.ac.id](mailto:yetniwati@unja.ac.id)

## INFO ARTIKEL

*Sejarah Artikel:*

Diterima: 7 June 2023

Direvisi: 17 October 2023

Disetujui: 29 January 2024

Tersedia Daring: 20 March 2024

*Kata Kunci:*

*Perspektif*

*Pembelajaran*

*Hukum Ketenagakerjaan*

*Entrepreneurship*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif guru dan siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun *entrepreneurship* alumni. Untuk mengetahui pentingnya hak dan kewajiban sebagai pekerja, lalu mengenai hukum ketenagakerjaan yang ada. Penelitian ini dilakukan di SMKS Fania Salsabila Kota Jambi. Data penelitian diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap guru, siswa serta kepala seksi kurikulum penilaian SMK dinas Provinsi Jambi. Dengan informan yang dijadikan subjek meliputi: 2 guru, 3 siswa dan 1 dinas provinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif *Narrative Research*. Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa perspektif guru dan siswa SMK tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan adalah guru dan siswa kurang mengetahui, memahami hukum ketenagakerjaan namun mengetahui penting dan menyetujui adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian ini disarankan agar guru dan siswa saling bekerjasama untuk merealisasikan pembelajaran hukum ketenagakerjaan pada kurikulum sekolah menengah kejuruan.

## ABSTRACT

*Keywords:*

*Perspective*

*Learning*

*Employment Law*

*Entrepreneurship*

This research aims to find out the perspective of teachers and students of Fania Salsabila Vocational School, Jambi City regarding the urgency of learning employment law to develop entrepreneurship alumni. To find out the importance of your rights and obligations as a worker, then regarding existing employment laws. This research was conducted at Fania Salsabila Vocational School, Jambi City. Research data was obtained by observing, interviewing and documenting teachers, students and the head of the Jambi Province official vocational school assessment curriculum section. The informants used as subjects included: 2 teachers, 3 students and 1 Jambi provincial office. The approach used is a descriptive qualitative approach with descriptive qualitative research type narrative research. The research results can be concluded that the perspective of vocational school teachers and students regarding the urgency of learning labor law is that teachers and students do not know enough, understand labor law but know it is important and agree that learning labor law is important. From the results of this research, it is recommended that teachers and students work together to realize labor law learning in the curriculum and vocational high schools.



## **1. Pendahuluan**

Manusia menjalankan hidup dengan mempunyai banyak kebutuhan yang berbagai macam sehingga membuat manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Memenuhi kebutuhan yang berbagai macam itu ada jenis – jenis pekerjaan misalnya pekerjaan usaha yang memerlukan tenaga kerja melalui akuntabilitas untuk memenuhi kepentingan individu tanpa terikat perintah orang lain dan jenis pekerjaan berikutnya yaitu bekerja terikat dengan orang lain seperti bekerja sebagai warga Negara Indonesia harus tahu undang-undang atau aturan yang ada pada pekerjaan tersebut.

Maka dari itu, adapun berkesinambungan dengan hukum ketenagakerjaan yaitu seseorang yang bekerja untuk orang lain di bawah arahan mereka tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan. Indonesia mempunyai hak warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan, hak itu menjadi hak dasar yang wajib didapatkan oleh warga Negara Indonesia sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Menurut G. Karta Soeputra (Ida Hanifah, 2020) Hukum Ketenagakerjaan adalah komponen peraturan perundang-undangan (semua undang-undang) yang relevan menjadi landasan untuk membenahi antara hubungan kerja dan pekerja/karyawan dengan usahanya, termasuk kegiatan sehari-hari dan praktik kerja yang berkesinambungan langsung pada hubungan kerja. Adapun nilai pada Pancasila yaitu sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan maksud harus adanya keadilan yang merata dari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, dari nilai Pancasila itulah adanya pembuatan berbagai undang-undang yang mengatur karyawan dan pemilik usaha dalam segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi seharusnya Hukum ketenagakerjaan dapat menjamin ketertiban, nilai keadilan, kepastian hukum, perlindungan dan penegakan hukum.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2023 dengan guru dan siswa SMKS Fania Salsabila, penulis mewawancarai dua guru yakni bapak Zulfahmi S.Pd Waka Kurikulum dan ibu Apt. Yosa Nova Irya, S farm, Gr Kaprodi Farmasi mengampu mata pelajaran K3LH (Kesehatan, keselamatan, kerja dan lingkungan hidup). Kemudian penulis memberikan pertanyaan mengenai urgensi pembelajaran Hukum Ketenagakerjaan. Setelah diwawancara jawaban dari bapak dan ibu guru tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran Hukum ketenagakerjaan ini sangat penting untuk profesi dan jurusan masing-masing siswa yang ada, karena siswa SMK tersebut setelah menyelesaikan pendidikannya dipersiapkan untuk langsung bekerja di masyarakat.

Menurut ibu Yosa, hukum ketenagakerjaan ini sangat penting dengan profesi tenaga kesehatan misalnya dengan mata pelajaran yang masih berkesinambungan pada hukum ketenagakerjaan yaitu K3LH sistem keselamatan kerja berguna dalam proses pembelajaran. Kemudian kesiapan siswa walaupun guru sudah memenuhi peran mengarahkan kebidang sesuai minat mereka namun tetap saja belum sepenuhnya siap, lalu hak dan kewajiban sebagai pekerja tidak sepenuhnya siswa mengetahui tentang pemahaman tersebut karena tidak ada pembelajaran yang spesifik membahas mengenai hukum ketenagakerjaan. Lalu, menurut Abdi Pratama, Bunga Fianira dan Alin Dela Hafitri hukum ketenagakerjaan penting untuk dipelajari bagi siswa/siswi SMKS Fania Salsabila agar dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai tenaga kerja. Jadi ilmu dari hukum ketenagakerjaan ini sangat penting bagi diri sendiri guna untuk mempersiapkan bekal sebagai pekerja nantinya setelah lulus dari sekolah, sehingga membuat lulusan yang siap dengan dunia pekerjaan.

Pembelajaran Hukum Ketenagakerjaan berguna untuk lulusan SMK agar tidak diberlakukan semena-mena dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai pekerja, lalu paham akan keselamatan dalam bekerja. Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi pada siswa SMK 1 Muaro Jambi yang sedang magang di perusahaan triplek dikutip dari artikel

medcom.id yang berjudul “Tragis, Siswa SMK Peserta Magang Tewas Terjepit Mesin Press Tripleks” kejadian kecelakaan kerja itu terjadi pada Senin, 31 Oktober 2022. Pada saat itu seorang pelajar yang sedang melaksanakan kegiatan praktik atau magang di pabrik PT SGS terjepit mesin press tripleks yang akhirnya korban meninggal di rumah sakit.

Guru berperan untuk menginformasikan mengenai urgensi dari pembelajaran hukum ketenagakerjaan sebagai bekal siswa di dunia kerja agar tidak diberlakukan semena-mena. Dampak positif dengan adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan membuat siswa lebih mengerti prosedur bekerja nanti sehingga mereka paham mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja, upah, perlindungan hukum bagi pekerja, landasan hukum dan perundang-undangan dengan mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

Kurikulum dari SMK Fania Salsabila itu sendiri menggunakan kurikulum SMK 2013 REV Teknologi Laboratorium Medik. Sebagai salah satu komponen pendidikan kejuruan menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat menghasilkan tenaga teknis industri yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan di masa yang akan datang, meningkatkan standar dan kelangsungan sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan hal tersebut Peraturan Menteri Pendidikan untuk membuat Standar Nasional Pendidikan Sekolah Kejuruan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Seni dan Budaya (SNP SMK).

Pentingnya hukum ketenagakerjaan bagi siswa lulusan SMK berguna untuk masa depan siswa. Mereka akan paham mengenai hukum ketenagakerjaan seperti dapat membuat siswa siap masuk ke dunia kerja setelah lulus nanti, memberikan pengetahuan hak-hak mereka sebagai tenaga kerja, pengetahuan tentang pencegahan pelanggaran ketenagakerjaan, persiapan berwirausaha, etika kerja dan tanggung jawab sosial. Kualitas rendahnya pengetahuan siswa tentang peraturan ketenagakerjaan lulusan SMK membuat semakin minimnya pemahaman warga Negara Indonesia tentang peraturan atau perundang-undangan ketenagakerjaan bagi generasi muda. Banyaknya lulusan SMK yang kurang pekerjaan menunjukkan tingkat kesiapan lulusan sekolah masih rendah dalam dunia pekerjaan.

Di Indonesia, angka pengangguran lulusan SMK tahun 2020 sebesar 8,49 persen. Meski proporsi ini menurun dalam lima tahun terakhir, lulusan SMK tetap menjadi mayoritas peserta tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia. TPT di Indonesia berjumlah 4,99 persen pada Februari 2020 (BPS, 2020b). Target rencana pembangunan jarak menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mensyaratkan TPT di Indonesia 4-4,6 persen pada 2024, masih terlampaui dari angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai penyumbang TPT terbesar di Indonesia, persentase lulusan SMK yang menganggur harus diturunkan agar TPT di Indonesia dapat memenuhi tujuan RPJMN pada tahun 2024 (Wijaya & Diah Utami, 2021: 805).

Pembelajaran hukum ketenagakerjaan berperan penting untuk kesiapan siswa/siswi SMK dalam membangun jiwa *entrepreneurship* yang berkualitas. Alumni sekolah kejuruan harus menaruh minat yang besar terhadap kewirausahaan karena hal ini dapat membantu mereka memanfaatkan kemampuan dan informasi yang telah mereka pelajari, mendirikan usaha perusahaan baru, dan mendukung pembangunan masyarakat dalam ekonomi.

Persepektif guru dan siswa SMK sangat diperlukan dalam menyampaikan dan menginformasikan kepada siswa mengenai hukum ketenagakerjaan seperti hak dan kewajiban di dunia kerja dan pembekalan untuk dunia kerja. Pendidikan diperlukan sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju maka dari itu menurut Soeprijanto (Haryanti & Santoso, 2021) pandangan lebih luas ataupun tertentu secara lebih umum, profesionalisme dalam administrasi pendidikan berkaitan dengan efisiensi karena mencakup disiplin, kesetiaan, pengetahuan, dan etos kerja.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, makna dan proses ditunjukkan dalam jenis penelitian ini dengan dasar teoritis yang digunakan sebagai panduan untuk menjaga penelitian agar sesuai dengan realitas yang terdapat di lapangan. Menurut Wiratna Sujarweni (Enifika et al., 2020: 3) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai dari setiap variabel, baik itu satu variabel atau lebih, secara terpisah tanpa melibatkan analisis hubungan atau perbandingan antar variabel.

Penelitian ini menggunakan *narrative research* yaitu melakukan studi terhadap satu orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh data tentang persepektif guru dan siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun entrepreneurship alumni.

Dalam penelitian kualitatif data bersifat tinggi memiliki karakteristik yang valid dan konsisten kebenaran objektifnya. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (Argiani, 2017: 130) data primer merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti selaku penulis subjek langsung di lapangan. Data sekunder menurut Wiratna Sujarweni (Enifika et al., 2020: 3) data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya berupa buku, catatan, majalah, pemerintah, buku-buku sebagai teori dan lainnya. Lalu, sumber data merupakan objek dari mana asal data penelitian itu didapatkan. Berbagai jenis sumber data, seperti dokumen, sumber, peristiwa, kegiatan, tempat, atau lokasi, serta objek, gambar, atau rekaman, dapat dikumpulkan melalui penelitian kualitatif.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di tempat yang telah ditentukan antara lain SMKS Fania Salsabila Kota Jambi untuk memperhatikan langsung apa yang terjadi mengenai kondisi dan hal yang nyata, untuk kelengkapan dan perbandingan pada keterangan dari teori-teori dalam bahan pustaka. Menurut Sugiyono (Alfitriani et al., 2022: 183) ketika melaksanakan karya ilmiah dengan awalan untuk mengidentifikasi masalah yang dapat diteliti dan ketika jumlah responden sedikit dan peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari responden. Menurut Zuriyah (Fiantika et al., 2022: 14) dokumentasi adalah metode asli pengumpulan data dari sumber-sumber seperti arsip dan publikasi yang berkaitan dengan masalah kajian, teori, pandangan, argumen, dan peraturan perundang-undangan.

Miles dan Huberman membuat pernyataan bahwasannya kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara sangat aktif dan berlangsung lama sampai tuntas hingga menemukan rasa jenuh. Aktifitas yang digunakan melalui analisis data meliputi data *reduksi, data display, conclusion/drawing/verification* (Tsabit et al., 2020: 80).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Molenaar Hukum Ketenagakerjaan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya mengatur bagaimana karyawan dan majikan, karyawan dan karyawan lain, serta karyawan dan pengusaha berinteraksi satu sama lain. Konsep dari definisi hukum ketenagakerjaan yang diungkapkan oleh Molenaar menangkap sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan karena pada awalnya pengusaha dan karyawan bebas untuk memutuskan keadaan kerja selain yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja (Ida Hanifah, 2020: 10). Jadi dengan adanya hukum ketenagakerjaan ini dapat mengatur para pekerja dan pengusaha untuk bertindak dengan aturan dan syarat-syarat sebagai pekerja, agar tidak terjadinya tindakan yang semena-mena terhadap pekerja.

Wawancara dengan pihak guru, siswa maupun dinasi provinsi jambi dilakukan berdasarkan indikator ketenagakerjaan yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran (Syafiyah et al., 2020: 804).

### **3.1 Perspektif Guru SMKS Fania Salsabila Kota Jambi**

Pembelajaran hukum ketenagakerjaan berguna sebagai bekal untuk kesiapan siswa dan siswi khususnya pada sekolah menengah kejuruan karena lulusan sekolah tersebut dipersiapkan untuk alumni yang siap kerja. Namun bahwasannya pembelajaran yang membahas hukum ketenagakerjaan ataupun ketenagakerjaan itu sendiri tidak ada pada pembelajaran mengenai ketenagakerjaan, sehingga siswa hanya siap secara raga untuk terjun ke dunia pekerjaan. Meskipun ada pembelajaran yang membahas mengenai ketenagakerjaan tetapi tidak secara detail tentang ketenagakerjaan dan apa hukum ketenagakerjaan itu sendiri.

Peneliti bertanya berdasarkan indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui bagaimana persepektif guru mengenai urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun entrepreneurship alumni. Peneliti mendapatkan informasi bahwasannya di sekolah kejuruan tersebut yang bertujuan untuk menciptakan alumni siap dengan dunia kerja, namun nyatanya tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban pekerja. Artinya pembelajaran hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk siswa sekolah menengah kejuruan sebagai bekal mereka untuk kesiapan terjun ke dunia pekerjaan.

Kemudian tidak hanya itu menurut pandangan guru tersebut sebagai pengajarpun tidak mengajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja secara detail, jika membahas ketenagakerjaan saja itu pada pembelajaran yang masih berhubungan namun tidak secara detail dikarenakan tidak adanya sosialisasi itu sendiri mengenai hukum ketenagakerjaan. Karena ketidaktahuan itu peneliti mendapatkan informasi bahwasannya ketersediaan tenaga kerja setelah selesai dari sekolah menengah kejuruan cukup dibutuhkan karena telah bekerja sama dengan pihak yang berhubungan dengan sekolah, namun sangat disayangkan sebagai siswa yang telah mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan tidak mengetahui pentingnya hukum ketenagakerjaan.

Pembelajaran hukum ketenagakerjaan menurut pandangan guru sangat diperlukan untuk bekal siswa meskipun telah disediakan lulusan yang siap bekerja setelah lulus nanti. Jika siswa yang setelah lulus nanti tidak mengetahui hukum ketenagakerjaan siswa tersebut akan bingung jika terjadi sesuatu dalam halnya pemutusan hubungan pekerjaan, karena ketidaktahuan itu siswa secara tidak sadar akan menerima dengan pikiran yang tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah pemutusan hubungan pekerjaan tersebut.

Ketika dua pihak sepakat untuk melakukan pekerjaan dan menandatangani serta menyetujui peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti Perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama (PKB), dan peraturan lainnya, maka terjalinlah hubungan kerja. Suatu hubungan kerja harus berakhir apabila jika terjadi salah satu pihak menolak meneruskan hubungan, kedua belah pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan atau ada keadaan lain yang otomatis menyebabkan koneksi terhenti bekerja. Pasal 1 ayat 25 UU No. 13 Tahun 2003 “menjelaskan penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan oleh hal tertentu yang mengakhiri hak dan kewajiban pekerja, buruh, dan pemilik usaha” (Sarah Selfina Kuhaty, 2021: 137).

Lalu, menurut persepektif guru kualitas tenaga kerja perlu dibenahi lagi karena minimnya pengetahuan tentang dunia pekerjaan ini membuat banyaknya pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab yang memperlakukan pekerja semena-mena, sebagai pengajar sekolah menengah kejuruan seharusnya memberikan pembelajaran yang pas untuk siswa agar siap menghadapi dunia pekerjaan dengan memahami dan mengeahui hukum ketenagakerjaan membuat siswa paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja nantinya. Dengan adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan dapat menciptakan lulusan sekolah menengah kejuruan dengan jiwa entrepreneurship yang berkualitas untuk diri sendiri dan membanggakan nama sekolah maupun Indonesia.

### **3.2 Perspektif Siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi**

Persyaratan dan hak minimum ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan untuk semua pekerja, termasuk lulusan sekolah kejuruan baru. Hal ini mencakup hak atas jam kerja yang sesuai, gaji minimum, dan perlindungan lainnya terhadap eksploitasi dan pelecehan. Setelah lulus dari sekolah kejuruan, beberapa siswa mungkin berniat untuk memulai pekerjaan mereka. Peraturan ketenagakerjaan yang memadai dapat menyediakan lingkungan kerja yang stabil, menawarkan jalan untuk kemajuan profesional, dan mendorong siswa untuk mengejar karir yang selaras dengan minat dan kemampuan mereka. Sebuah komponen dari sistem pendidikan yang disebut pendidikan kejuruan melatih siswa untuk bekerja dalam kelompok pekerjaan tertentu.

Peneliti mendapatkan informasi pembelajaran ketenagakerjaan ini adanya di mata pelajaran manajemen farmasi membahas tentang k3 (kesehatan dan keselamatan bekerja). Pembelajaran k3 ada dikarenakan sekolah yang dijadikan objek penelitian adalah sekolah kesehatan, dengan adanya pembelajaran k3 yang masih berhubungan dengan ketenagakerjaan itu cukup membantu sebagai tenaga kerja. Unsur terpenting dalam bekerja adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Misalnya, proyek konstruksi yang membantu kemajuan bangsa adalah proyek yang fokus pada pekerjaan yang berat dengan adanya unsur yang mempersulit penerapan dan membahayakan tenaga kerja. Karena ketiadaan K3 dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan atau seperti kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian laboratorium dengan menaikkan biaya akibat kecelakaan kerja ringan, sedang, atau berat (Wahyurianto & Fioriantika, 2022: 94).

Kemudian peneliti menanyakan kepada siswa apakah kegiatan disekolah dapat mempengaruhi kesiapan dalam bekerja, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya siswa – siswa tersebut mengungkapkan kegiatan disekolah cukup membantu mereka dalam kesiapan bekerja salah satunya seperti praktek kerja lapangan. Namun, mereka tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban tenaga kerja, peraturan tentang ditempat mereka bekerja, dan berapa upah yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Cara mengantisipasi agar tidak terjadinya ketidakadilan dan ketidaktahuan mereka dalam bekerja dengan cara memahami mempelajari tentang hukum ketenagakerjaan untuk menjadi bekal kesiapan bekerja siswa. Menurut Kartini (Krisnamurti, 2017: 67) banyak faktor pada kesiapan bekerja dari faktor internal dan eksternal maupun lingkungan yang berasal dari dalam dan luar berpengaruh terhadap kesiapan kerja.

Peneliti mendapatkan informasi dari siswa tersebut bahwasannya mereka telah menentukan karir setelah lulus nanti sesuai dengan jurusan yang mereka ampu, sedangkan jawaban mereka selanjutnya mengatakan bahwasannya pembelajaran ketenagakerjaan sudah cukup tetapi hanya mengetahui dasar dari pembelajaran ketenagakerjaan. Kesimpulan dari pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan ungkapan mereka yang sebutkan mengenai telah menentukan karir setelah lulus nanti, karena dengan ketidaktahuan tentang pembelajaran hukum ketenagakerjaan akan membuat siswa tersebut kebingungan dalam menjalani dan terjun langsung ke dunia pekerjaan, lalu kesulitan mendapatkan kesempatan bekerja yang adil dan layak bagi mereka dalam mencari pengalaman bekerja, dari penelitian ini faktor yang diduga

paling berpengaruh terhadap kesiapan kerja siswa SMK adalah kurangnya pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan, peraturan tenaga kerja, upah, keselamatan bekerja, hak dan kewajiban, hubungan pekerjaan.

Pembelajaran Hukum ketenagakerjaan berguna untuk menambah pengetahuan di sekolah kejuruan, penting bagi siswa untuk menentukan pekerjaan yang sesuai dan adil pada para pekerja tentunya untuk adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan pada kurikulum ini dengan bantuan pemerintah sesuai dengan kesiapan bekerja menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan sekolah kejuruan adalah untuk mengembangkan kualitas profesional peserta didik dan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja (Kuat, 2017: 133).

Adanya berbagai perspektif siswa SMK Fania Salsabila tersebut dapat ditarik kesimpulan siswa sekolah menengah kejuruan sangat memerlukan adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan lulusan berkualitas yang berjiwa entrepreneurship dan membanggakan sekolah tersebut.

### **3.3 Perspektif Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**

Hukum ketenagakerjaan penting untuk kesejahteraan di Indonesia terutama pada bidang pendidikan yang akan menciptakan lulusan berjiwa entrepreneurship berkualitas. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dari sisi sosial ekonomi, kondisi kerja pekerja memerlukan perlindungan hukum dari negara karena berpotensi perilaku bertindak sewenang-wenang yang dilakukan pengusaha. Peraturan ketenagakerjaan yang berlaku untuk bekerja di sektor publik mungkin berbeda antar negara dan wilayah. Hak dan kewajiban pegawai pemerintah diatur oleh undang-undang di banyak negara. Undang-undang ini mencakup topik-topik seperti kontrak kerja, kebebasan berserikat, gaji, jam kerja, dan perlindungan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mendefinisikan tenaga kerja sebagai “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat”. Menurut Payaman Simanjuntak ketenagakerjaan adalah orang yang pernah atau sedang bekerja, pencari kerja, dan orang yang melakukan aktivitas lain seperti bersekolah dan mengurus rumah semuanya adalah penduduk, Ia menegaskan bahwa usia menentukan apa yang dimaksud dengan kerja dan non-buruh (Doni Sipayung, 2022: 5).

Dalam temuan yang dilakukan peneliti di dinas pendidikan provinsi Jambi menyatakan bahwa pembelajaran tentang hukum ketenagakerjaan penting untuk dipelajari di SMK, karena sangat berguna sebagai bekal siswa menentukan peluang bekerja yang baik dan adil. Dengan adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan membuat siswa paham akan dunia pekerjaan sehingga menciptakan lulusan siswa yang berkualitas dan berjiwa entrepreneurship sesuai dengan visi misi SMK.

Setelah peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara kepada Dinas pendidikan provinsi Jambi pada bagian penilaian kurikulum SMK, peneliti mendapatkan bahwasannya dari informasi yang didapat kualitas tenaga kerja saat ini cukup membaik namun, tidak bisa dipungkiri juga terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil. Dengan kurangnya pemahaman siswa dengan hukum ketenagakerjaan membuat mereka kebingungan dengan apa yang terjadi kepada mereka setelah diberhentikan secara paksa ataupun tidak di gaji secara semestinya.

Kemudian peneliti dengan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan indikator, peneliti mendapatkan informasi bahwa dengan pembahasan kualitas tenaga kerja diatas tidak dapat dipungkiri juga jenis kelamin sangat menentukan partisipasi dan produktivitas dalam bekerja, tentunya laki-laki dan perempuan berbeda jika dari segi fisik. Namun, masih banyak

yang belum paham tentang hak dan kewajiban sebagai laki-laki dan perempuan di dunia pekerjaan.

Hukum Ketenagakerjaan berperan penting untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja yang akan dilakukan siswa dan siswi setelah lulus nanti, agar mereka tidak kaget dengan apa yang terjadi dilapangan. Selain itu pada saat penelitian penulis mengetahui dari dinas pendidikan bahwasannya pembelajaran hukum ketenagakerjaan ini sangat penting dipelajari bahkan secara umum dengan begitu dapat menciptakan sumber daya manusia yang memiliki jiwa entrepreneurship yang etos kerjanya bagus dan harapannya dapat bersaing di kanca Internasional.

Dinas pendidikan provinsi Jambi sangat menyetujui adanya mata pelajaran yang membahas mengenai hukum ketenagakerjaan karena dapat membantu siswa SMK untuk menciptakan lulusan yang berkualitas, namun pembelajaran tersebut perlu disosialisasikan ke guru-guru agar dapat menyampaikan materi ini dengan baik, dari penilain kurikulum SMK menyarankan untuk dimasukan ke mata pelajaran yang masih berkesinambungan dengan hukum atau ketenagakerjaan dan berdasarkan ilmu pedagogik. Karena jika untuk dijadikan satu mata pelajaran itu cukup sulit untuk direalisasikan dengan kurikulum SMK yang sudah ada, perlu bantuan juga dari pemerintah pusat tentang pembelajaran tersebut.

Pendidikan mempunyai peran penting bagi anak-anak maupun orang dewasa, setiap lulusan suatu sekolah, baik resmi maupun tidak resmi akan memasuki masyarakat atau dunia kerja yang berhadapan dengan tuntutan dunia nyata guna memenuhi posisinya di dalamnya. Adanya hukum ketenagakerjaan membuat siswa memahami apa itu hak dan kewajiban sebagai bekerja ataupun peraturan yang ada sehingga dapat menciptakan siswa berjiwa entrepreneurship yang berkualitas dalam mencegah adanya pengangguran. Menurut Mulia Ginting Munthe (Bahri, 2016: 35) salah satu strategi untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan mendorong generasi muda untuk berwirausaha, karena hal ini merupakan tanda negara berkembang.

Peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai informasi yang didapat pada saat penelitian, Dinas pendidikan provinsi Jambi sangat sepakat dan setuju adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan, meskipun jikat untuk dibuatkan sebagai mata pelajaran itu masih belum bisa dikarenakan langsung dari pusat harus diberi tahu dan akan sulit untuk merubah kurikulum yang sudah ada. Tetapi pembelajaran hukum ketenagakerjaan ini dapat dimasukan kedalam mata pelajaran yang sudah ada dikurikulum SMK. Salah satu contohnya PPKn karena berhubungan dengan hukum dan kewarnegaraan ataupun yang sudah ada di SMKS Fania Salsabila tengan pemebelajaran K3 lebih ditekankan lagi mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun hukum yang ada di ketenagakerjaan.

#### **4. Kesimpulan**

Pembelajaran hukum ketenagakerjaan berguna sebagai bekal untuk kesiapan siswa dan siswi khususnya pada sekolah menengah kejuruan karena lulusan sekolah tersebut dipersiapkan untuk alumni yang siap kerja. Pendidikan diposisikan sebagai alat yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prospek pekerjaan saat ini. Dengan kata lain, tujuan utama pembelajaran hukum ketenagakerjaan ini adalah untuk memberikan prospek pekerjaan yang dapat dicapai oleh komunitas pengguna melalui pendidikan. Harapan yang tinggi untuk pendidikan kejuruan adalah untuk membekali siswa dengan pendidikan yang solid dapat melengkapi tuntutan dunia industri dan menanamkan dalam diri mereka rasa kewirausahaan yang kuat. Membangun jiwa entrepreneur melalui pendidikan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan (SMK) sangat diperlukan untuk menghasilkan generasi muda yang mandiri dan sejahtera sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.



Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan pembahasan mengenai persepektif guru dan siswa SMKS Fania Salsabila Kota Jambi tentang urgensi pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk membangun entrepreneurship alumni. Pembelajaran hukum ketenagakerjaan menurut pandangan guru sangat diperlukan untuk bekal siswa meskipun telah disediakan lulusan yang siap bekerja setelah lulus nanti. Jika siswa yang setelah lulus nanti tidak mengetahui hukum ketenagakerjaan siswa tersebut akan bingung jika terjadi sesuatu dalam halnya pemutusan hubungan pekerjaan, karena ketidaktahuan itu siswa secara tidak sadar akan menerima dengan pikiran yang tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah pemutusan hubungan pekerjaan tersebut. Adanya berbagai perspektif siswa SMK Fania Salsabila tersebut dapat ditarik kesimpulan siswa sangat memerlukan adanya pembelajaran hukum ketenagakerjaan untuk menciptakan lulusan berkualitas. Dinas pendidikan provinsi Jambi pada bagian penilaian kurikulum SMK, setuju adanya mata pelajaran yang membahas mengenai hukum ketenagakerjaan karena dapat membantu siswa SMK untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan berjiwa entrepreneurship.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan kerjasama mereka. Kepada Bapak Drs. M. Salam, M.Si., Nurmalia Dewi, M.Pd dan Dr. Yetniwati, S.H., M.H. yang telah memberikan panduan dan bimbingan yang berharga sepanjang perjalanan penelitian ini. Terakhir, terimakasih kepada keluarga dan teman-teman atas dukungan moral dan motivasi yang mereka berikan selama proses penelitian ini. Tanpa dukungan mereka, perjalanan ini akan jauh lebih sulit maka dari itu saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih.

## 6. Daftar Pustaka

- Alfitriani, D., Al-maruf, M. N., Prayitno, M. H., Nahdlatul, U., & Sidoarjo, U. (2022). : *Jurnal Pendidikan Dasar E-ISSN: 2614-4417 Volume VI, Nomor 2, November 2022. VI(November).*
- Argiani, D. V. (2017). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BANK Mandiri Jember (Persero). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1–92.
- Bahri, S. (2016). Komparasi Kemandirian Siswa Berlandaskan Jiwa Entrepreneurship di SMK N 2 Mataram. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 33–51.
- Dony Sipayung, P., Orba Manullang, S., Anggusti, M., & Ilmi Faried, A. (2022). *Buku hukum ketenagakerjaan* (Issue February 2023). Yayasan Kita Menulis 132 hlm.
- Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H (2020). *Buku Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Medan. Pustaka prima.* 16, 5x24 cm. ISBN : 978-623-93332-5-6.
- Enifika, D. R., Bahari, Y., & Salim, I. (2020). Relasi Sosial Asosiatif Dalam Kelompok Tani Dewi Ratih Kecamatan Mempawah Hilir Kelurahan Terusan. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 9, 1–7.  
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/41543>.
- Feni, R. Fiantika, Kusmayra, A., & Anita, M. (2022). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif.* PT. Global eksekutif teknologi, *Cetakan pertama*, 215 hlm.
- Haryanti, A., & Santoso, B. (2021). *Perlindungan hukum bagi peserta didik pada Sekolah Menengah Kejuruan selama melaksanakan praktek kerja lapangan di masa pandemi covid - 19.* *Jurnal Civics media kajian kewarnegaraan* 1-20.

- Krisnamurti, T. F. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Kerja Siswa Smk. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 6(1), 65–76.
- Kuat, T. (2017). Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan melalui Implementasi Edupreneurship di Sekolah Menengah Kejuruan. *Seminar Nasional Pendidikan 2017 (SNP 2017), 2017(Snp)*, 131 hlm.
- Sarah Selfina Kuhaty, E. a. (2021). Buku Hukum Ketenagakerjaan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Syafiyah, U., Asrafi, I., Wicaksono, B., Puspitasari, D. P., & Sirait, F. M. (2020). Analisis Perbandingan Hierarchical dan Non-Hierarchical Clustering Pada Data Indikator Ketenagakerjaan di Jawa Barat Tahun 2020. *Jurnal Politeknik Statistika STIS*, 803–812.
- Tsabit, D., Rizqia Amalia, A., & Hamdani Maula, L. (2020). Analisis Pemahaman Konsep Ips Materi Kegiatan Ekonomi Menggunakan Video Pembelajaran Ips Sistem Daring Di Kelas Iv.3 Sdn Pakujajar Cbm. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, V(Vol 5 No 1 June 2020).
- Wahyurianto, Y., & Fioriantika, B. A. (2022). Pengetahuan Dan Perilaku Siswa Dalam Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Laboratorium Kerja Smk Taruna Jaya Prawira Tuban. *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 6(2), 180. <https://doi.org/10.52020/jkwgi.v6i2.3755>.
- Wijaya, R. B. M. O., & Diah Utami, E. (2021). Determinan Pengangguran Lulusan SMK di Indonesia Tahun 2020 Analisis Data Sakernas Februari 2020 (Determinants of Unemployment of Vocational High School Graduates in Indonesia in 2020). *Jurnal Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(17), 801–810.